

# PENGUATAN TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA PEREMPUAN DIASPORA MELALUI PENYUSUNAN SOP KERJA SAMA

Nita Fitriana

Prodi Manajemen, STIE Widya Wiwaha-email: nitafitriana@stieww.ac.id

## Ringkasan

*Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk menyusun Standard Operating Procedure (SOP) Kerja Sama Pimpinan Cabang Istimewa (PCI) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Malaysia. Selama ini, kegiatan kolaboratif yang melibatkan pihak eksternal cenderung bersifat top-down dan kurang responsif terhadap kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif-kolaboratif digunakan dalam kegiatan ini, dengan melibatkan 15 pengurus PCI Fatayat NU secara daring dan luring selama periode November 2024 hingga April 2025. Hasil kegiatan ini adalah dokumen SOP yang terdiri dari sepuluh prosedur kerja sama, mulai dari inisiasi kegiatan hingga pelaporan dan evaluasi. SOP ini diharapkan menjadi pedoman resmi dalam menjalin kerja sama yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. PKM ini juga memperkuat kapasitas kelembagaan Fatayat NU sebagai organisasi perempuan diaspora dalam menjalin sinergi dengan pihak eksternal.*

## Keywords

Partisipatif kolaboratif, SOP, kerja sama, Fatayat NU, pemberdayaan perempuan, organisasi diaspora.

## 1. Pendahuluan

Malaysia saat ini menjadi salah satu negara penerima pekerja migran terbesar di Asia Tenggara. Menurut pernyataan Menteri Sumber Manusia di Parlemen Malaysia, sampai tanggal 31 Desember 2024, terdapat 2.368.422 pekerja migran asing di Malaysia [1]. Dari sisi asal negara, Indonesia menjadi negara terbesar yang mengirimkan pekerja migran ke Malaysia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur mencatat saat ini terdapat 1,5 juta orang Pekerja Migran Indonesia di Malaysia [2]. Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan porsi pekerja migran perempuan mendominasi; misalnya tahun 2021 mencapai 87,9% dan pada September 2023 sekitar 68% dari penempatan bulanan [3]. Tren ini menegaskan akan pentingnya desain program yang sensitif gender khususnya dalam melindungi hak-hak pekerja migran perempuan.

Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi perempuan muda di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang memiliki fokus pada pemberdayaan perempuan muda melalui berbagai kegiatan di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan [4]. Di berbagai wilayah, termasuk di luar negeri seperti Malaysia, Fatayat NU memainkan peran penting dalam membangun ketahanan komunitas kalangan perempuan dan keluarga Indonesia. Sebagai organisasi perempuan, Fatayat NU memegang peranan strategis dalam mendorong transformasi sosial. Fatayat NU bukan sekadar menyelenggarakan kegiatan sosial, tetapi juga memiliki legitimasi kultural-keagamaan, dan bisa menjembatani warga, tokoh agama, serta pemerintah. Dengan peran tersebut, Fatayat bisa mendorong transformasi sosial: dari nilai patriarkal ke relasi yang lebih setara, dari ketergantungan ke kemandirian, dari praktik tidak sehat ke praktik yang melindungi perempuan dan anak.

Berbagai studi menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan anak, penguatan peran keluarga, dan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Perempuan yang memiliki akses terhadap pendidikan, informasi, dan pengambilan keputusan cenderung mampu memberikan kontribusi signifikan bagi keluarga dan masyarakatnya [5] [6]. Bahkan, peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan masyarakat telah terbukti berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tujuan 5-Kesetaraan Gender, SDGs tujuan 8-perlindungan hak pekerja, termasuk migran perempuan, dan SDGs tujuan 16-Institusi yang Tangguh [7].

Di Malaysia, Fatayat NU menjalankan berbagai program sosial-keagamaan yang menjangkau komunitas pekerja migran, pelajar, dan keluarga Indonesia [8]. Kegiatan meliputi pengajian/kajian rutin bulanan, santunan, peringatan hari keagamaan, pelatihan dan *workshop*, Pendidikan anak dan Kesehatan [9]. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas program dan memperluas dampak, PCI Fatayat NU merasa perlu dukungan baik secara materiil maupun moril dari berbagai pihak. Oleh karenanya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak eksternal menjadi penting dan strategis.

Fatayat NU Malaysia telah menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan komunitas atas kerjasama dengan pihak eksternal. Namun, sebagian besar kegiatan kerjasama terlaksana atas inisiasi dari pihak eksternal dengan tidak memperhatikan kebutuhan organisasi. Hal tersebut berdampak pada kegiatan yang kurang tepat dan efisien bahkan tidak berkelanjutan.

Dalam konteks inilah, penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) menjadi langkah penting dan mendesak. SOP dapat memberikan pedoman baku bagi organisasi dalam menerima, merancang, dan mengevaluasi kerja sama secara terstruktur dan dipertanggungjawabkan. Menurut Hakim & Rahayuna (2024), SOP yang dirancang dengan baik tidak hanya menjamin konsistensi pelaksanaan, tetapi juga memfasilitasi komunikasi lintas institusi dan mendukung akuntabilitas kelembagaan. Penelitian lain juga menegaskan bahwa keberadaan SOP merupakan elemen penting dalam tata kelola organisasi berbasis kolaborasi, terutama untuk organisasi masyarakat sipil yang sering menjalin kerja sama dengan sektor eksternal [11]

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini secara khusus bertujuan untuk membantu Fatayat NU di Malaysia dalam menyusun dan merumuskan SOP kerja sama dengan pihak eksternal sebagai panduan resmi dan sistematis. SOP ini diharapkan menjadi alat kendali mutu organisasi dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan, efisien, serta bermanfaat secara timbal balik bagi kedua belah pihak.

## 2. Metode Penerapan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif-kolaboratif, yang menempatkan organisasi mitra sebagai subjek aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa hasil kegiatan — dalam hal ini berupa dokumen *Standard Operating Procedure* (SOP) — benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil organisasi dan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.

Pendekatan partisipatif-kolaboratif memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara akademisi dan komunitas, serta memperkuat keberlanjutan hasil kegiatan karena adanya rasa memiliki dari mitra terhadap solusi yang dihasilkan. Menurut Afdhal et al, [12], metode partisipatif dalam kegiatan pengabdian dapat meningkatkan efektivitas program karena melibatkan mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Selain itu, Qorib (2024) menekankan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat harus bersifat dialogis, berbasis kebutuhan lokal, dan dibangun atas dasar kesetaraan.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada bulan November 2024 hingga April 2025. Pelaksanaan dilakukan secara *hybrid*, yaitu melalui pertemuan *daring* dan *luring*. Pertemuan *luring* dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan tetap memperhatikan ketersediaan dan keterjangkauan peserta,

sementara pertemuan daring dilakukan melalui platform *Google meeting*, *Zoom* dan *WhatsApp Group* sebagai forum diskusi dan koordinasi.

Kegiatan ini melibatkan 15 orang pengurus Fatayat NU Malaysia, terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator Bidang. Para peserta dilibatkan secara aktif dalam proses pengumpulan data, diskusi, dan validasi dokumen SOP, guna memastikan adanya rasa memiliki terhadap hasil akhir.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan berikut:

1. Identifikasi Kebutuhan (*Need Assessment*):

Tim PKM melakukan wawancara dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) dengan pengurus Fatayat NU Malaysia untuk mengidentifikasi permasalahan, pengalaman kerja sama sebelumnya, serta harapan terkait format dan isi SOP kerja sama.

2. Kajian Dokumen dan Studi Literatur:

Pada tahap ini dilakukan penelusuran terhadap berbagai dokumen SOP organisasi sejenis serta referensi akademik mengenai praktik kerja sama antara organisasi masyarakat dan institusi Pendidikan atau lainnya. Data ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun kerangka dasar SOP.

3. Penyusunan Draf SOP:

Berdasarkan data primer dan sekunder yang diperoleh, tim PKM menyusun draf awal SOP yang mencakup: tujuan, ruang lingkup, alur kerja, pelaksana, format dokumen kerja sama, serta mekanisme evaluasi.

4. Uji Publik dan Finalisasi:

Draft SOP didiskusikan dalam forum uji publik internal yang melibatkan seluruh pengurus Fatayat NU untuk memperoleh masukan perbaikan. Proses ini dilakukan secara *hybrid* dan menghasilkan versi final SOP yang telah disepakati bersama.

5. Sosialisasi dan Penyerahan Dokumen SOP:

Dokumen SOP yang telah final disosialisasikan dan diserahkan kepada pengurus Fatayat NU Malaysia untuk digunakan sebagai pedoman kelembagaan.

### 3. Hasil dan Ketercapaian Sasaran

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini berhasil menghasilkan dokumen *Standard Operating Procedure* (SOP) Kerja Sama antara Fatayat NU Malaysia dengan Perguruan Tinggi, yang disusun berdasarkan hasil diskusi, kajian literatur, dan uji publik internal organisasi. SOP ini mencakup tujuh komponen utama sebagai berikut:

1. Tujuan

Menjadi pedoman formal dalam menjalin kerja sama antara Fatayat NU Malaysia dan perguruan tinggi, dengan menjamin prinsip efisiensi, akuntabilitas, kebermanfaatan bersama, dan kesesuaian dengan visi-misi organisasi.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk berbagai bentuk kerja sama, seperti kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar dan lokakarya, pelatihan peningkatan kapasitas, riset kolaboratif, pendampingan komunitas, serta pertukaran pengetahuan.

3. Struktur Penanggung Jawab

SOP menetapkan peran dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk Koordinator Kerja Sama, Sekretaris, dan Tim Teknis Pelaksana.

4. Prosedur Pelaksanaan

Prosedur disusun dalam bentuk alur kerja yang terdiri dari:

- a. Kontak Awal oleh Pihak Eksternal

Perguruan tinggi atau lembaga eksternal yang ingin menjalin kerja sama diharuskan menghubungi PCI Fatayat NU Malaysia selambat-lambatnya satu bulan sebelum rencana kegiatan dilaksanakan.

b. Pengajuan Informasi Kegiatan

Pihak eksternal menyampaikan deskripsi awal kegiatan yang meliputi tujuan, bentuk aktivitas, serta manfaat kegiatan bagi kedua belah pihak.

c. Informasi Kontribusi Kegiatan

Bentuk kontribusi pihak eksternal harus diinformasikan secara rinci. Kontribusi dapat berupa materi (dana), non-materi (tenaga, alat, narasumber), fasilitas (tempat, akomodasi, transportasi), hingga bentuk kerja sama jangka panjang.

d. Pengajuan Proposal

Pihak eksternal wajib mengirimkan proposal resmi yang berisi rincian kegiatan, jadwal, jumlah dan nama pelaksana, serta bentuk kerja sama yang diusulkan.

e. Koordinasi *Online*

PCI Fatayat NU Malaysia menjadwalkan pertemuan koordinasi *daring* guna menyepakati teknis pelaksanaan kegiatan.

f. Kesepakatan Bersama

Apabila telah tercapai kesepakatan, pihak eksternal wajib menginformasikan kebutuhan teknis selama pelaksanaan kegiatan seperti jumlah peserta, kebutuhan akomodasi, transportasi, dan logistik lainnya.

g. Penyaluran Infaq Administrasi

Pihak eksternal wajib menyalurkan infaq administrasi sebesar RM 300 sebelum kegiatan dimulai. Dana ini tidak dikembalikan apabila terjadi pembatalan sepihak.

h. Koordinasi Pra-Pelaksanaan (Opsional)

Jika diperlukan, dapat dilakukan koordinasi tambahan menjelang hari pelaksanaan kegiatan.

i. Perubahan Waktu Pelaksanaan

Setiap perubahan jadwal harus disampaikan minimal 2 minggu sebelumnya. Jika diinformasikan mendadak (<2 minggu), maka kegiatan dianggap batal.

j. Laporan Hasil Pelaksanaan

Setelah kegiatan selesai, pihak eksternal wajib mengirimkan laporan dalam bentuk *soft copy* paling lambat 2 bulan, yang mencakup:

5. Kontribusi Kegiatan

Dalam poin ini dijelaskan tentang dukungan Kerjasama baik dalam jangka pendek maupun Panjang.

6. Dokumentasi dan Arsip

SOP mewajibkan dokumentasi tertulis atas seluruh proses dan output kegiatan, termasuk foto, notulensi, laporan akhir, serta publikasi di media sosial atau media massa.

7. Evaluasi dan Monitoring

Terdapat indikator keberhasilan dan formulir evaluasi yang wajib diisi setelah kegiatan berakhir untuk menilai efektivitas program dan kerja sama.

8. Lampiran Dokumen

Termasuk di dalamnya adalah template MoU/MoA, form pengajuan kerja sama, format laporan kegiatan, dan panduan evaluasi.

Hasil penyusunan SOP kerja sama ini sejalan dengan praktik baik yang juga ditemukan pada organisasi masyarakat sipil lain. Studi PLOS ONE pada LSM menunjukkan kemitraan dengan tata

kelola kuat cenderung lebih berkelanjutan dan berdampak sosial nyata. SOP membantu menyeimbangkan relasi kuasa, memperjelas ekspektasi, serta menjaga akuntabilitas. Bahkan, SOP menjadi rujukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak hanya berorientasi seremonial, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap komunitas dampingan atau mitra [14].

Dari hasil FGD yang dilakukan, mayoritas pengurus Fatayat NU Malaysia (80%) menyatakan bahwa sebelum adanya SOP, mekanisme kerja sama seringkali berjalan tanpa standar yang jelas. Hal ini menyebabkan duplikasi kegiatan, keterlambatan laporan, dan kurangnya keberlanjutan program. Dengan SOP yang baru disusun, para pengurus berharap tercipta konsistensi prosedur dalam setiap kerja sama, yang dapat dievaluasi secara periodik.



Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi dan Penyerahan Dokumen SOP

#### 4. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini berhasil menghasilkan dokumen *Standard Operating Procedure* (SOP) Kerja Sama yang aplikatif dan kontekstual, disusun secara partisipatif bersama pengurus PCI Fatayat NU Malaysia. Dokumen SOP tersebut memuat alur kerja sama mulai dari inisiasi, penyusunan proposal, koordinasi teknis, hingga pelaporan dan evaluasi kegiatan.

Keberadaan SOP ini menjadi instrumen penting dalam membangun tata kelola kerja sama yang lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan antara organisasi perempuan diaspora dan institusi pendidikan tinggi. Melalui SOP ini, diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan perguruan tinggi dapat lebih tepat sasaran, selaras dengan kebutuhan komunitas, dan memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua belah pihak.

## Pustaka

- [1] Kosmo.com, “Dewan Rakyat: 2.3 juta pekerja asing di Malaysia bawah had siling - Kosmo Digital.” [https://www.kosmo.com.my/2025/02/06/dewan-rakyat-2-3-juta-pekerja-asing-di-malaysia-bawah-had-siling/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.kosmo.com.my/2025/02/06/dewan-rakyat-2-3-juta-pekerja-asing-di-malaysia-bawah-had-siling/?utm_source=chatgpt.com) (accessed Sep. 11, 2025).
- [2] K. I. dan Pemasarakatan, “Siaran Pers : Dirjen Imigrasi Temui Ketua Pengarah Imigresen Malaysia Bahas Pekerja Migran Indonesia di Malaysia – Direktorat Jenderal Imigrasi.” [https://www.imigrasi.go.id/siaran\\_pers/2023/06/08/siaran-pers-dirjen-imigrasi-temui-ketua-pengarah-imigresen-malaysia-bahas-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2023/06/08/siaran-pers-dirjen-imigrasi-temui-ketua-pengarah-imigresen-malaysia-bahas-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia?utm_source=chatgpt.com) (accessed Sep. 11, 2025).
- [3] BP2MI, “EXECUTIVE SUMMARY D A T A P M I 2 0 2 1.”
- [4] Nu.or.id, “Sejarah Fatayat NU.” <https://jabar.nu.or.id/sejarah/sejarah-fatayat-nu-SjUDc> (accessed Aug. 01, 2025).
- [5] OECD, “Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls,” *Gend. Equal. Empower. Women Girls*, May 2022, doi: 10.1787/0BDDFA8F-EN.
- [6] U. Women, “Progress on the Sustainable Development Goals: Gender Snapshot 2023.,” 2023, Accessed: Aug. 02, 2025. [Online]. Available: <https://bit.ly/gender-snapshot-2023>.
- [7] SDGs, “Perempuan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) – SDGs Indonesia.” <https://sdgs.bappenas.go.id/perempuan-dan-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sdgs/> (accessed Aug. 02, 2025).
- [8] N. Online, “Fatayat NU Malaysia Masa Khidmah 2022-2025 Dilantik, Ini Struktur Kepengurusannya.” <https://www.nu.or.id/internasional/fatayat-nu-malaysia-masa-khidmah-2022-2025-dilantik-ini-struktur-kepengurusannya-ByOjR> (accessed Aug. 02, 2025).
- [9] F. Malaysia, “Fatayat NU Mly (@pci\_fatayat\_nu\_malaysia) • Instagram photos and videos.” [https://www.instagram.com/pci\\_fatayat\\_nu\\_malaysia/](https://www.instagram.com/pci_fatayat_nu_malaysia/) (accessed Aug. 02, 2025).
- [10] Muhammad Fais Rahman Hakim and Viandra Rahayuna, “Analisis Efektivitas *Standard Operating Procedure* (SOP) Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Logistik Dan Distribusi Di CV. Sinar Teknik Perkasa,” *J. Manaj. Bisnis Era Digit.*, vol. 1, no. 2, pp. 233–243, 2024, doi: 10.61132/jumabedi.v1i2.131.
- [11] Fadila Rahmawati and Naura Nazhifah Suryana, “Pentingnya *Standard Operating Procedure* (SOP) Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Konsistensi Operasional Pada Perusahaan Manufaktur,” *J. Manaj. Bisnis Digit. Terkini*, vol. 1, no. 3, pp. 01–15, 2024, doi: 10.61132/jumbidter.v1i3.112.
- [12] A. Afdhal *et al.*, “Pemberdayaan Masyarakat,” Accessed: Aug. 04, 2025. [Online]. Available: [www.globaleksekitifteknologi.co.id](http://www.globaleksekitifteknologi.co.id).
- [13] F. Qorib, “Tantangan dan Peluang Kolaborasi antara Perguruan Tinggi dan Masyarakat dalam Program Pengabdian di Indonesia,” *J. Indones. Soc. Empower.*, vol. 2, no. 2, pp. 46–57, 2024, doi: 10.61105/jise.v2i2.119.
- [14] B. Barbé *et al.*, “The Art of Writing and Implementing Standard Operating Procedures (SOPs) for Laboratories in Low-Resource Settings: Review of Guidelines and Best Practices,” *PLoS Negl. Trop. Dis.*, vol. 10, no. 11, p. e0005053, Nov. 2016, doi: 10.1371/JOURNAL.PNTD.0005053.

- [15] I. Satibi, R. R. JY, and M. Agustina, “Optimalisasi *Standard Operating Procedure* (SOP) Bagian Protokol Melalui E-Schedule Pimpinan Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur,” *e-JKPP*, vol. 10, no. 3, p. 44, 2024, doi: 10.36448/ejkpp.v10i3.4288.
- [16] L. Kreiling and C. Paunov, “Knowledge co-creation in the 21 st century-An international experience-based policy report,” 2021, Accessed: Aug. 04, 2025. [Online]. Available: <http://www.oecd.org/termsandconditions>.